

SINERGI MEWUJUDKAN VISI PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH

Biyanto

Dosen Aqidah Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya

email: mr_abien@yahoo.com

Abstract:

This article discusses about the education of Muhammadiyah. The specialization of this study is synergy to realize point of view of Muhammadiyah on education. Based on research of literature, discovered six points of view of Muhammadiyah on education. First, the education of Muhammadiyah must become media in order to teach the concept of progressive Islam (Islam Berkemajuan). Second, the education of Muhammadiyah must become path of the enlightenment movement for the ummah. Third, the education of Muhammadiyah must give guarantee to realize the Theology of al-Ma'un (al-Ma'unism). Fourth, the education of Muhammadiyah must be pioneer for education of multiculturalism. Fifth, the education of Muhammadiyah must combine sincerity and professionalism values. Sixth, the education of Muhammadiyah must become media of religious proselytizing and forming of cadres, special for the student. In order to achieve the prespective, the institution of education of Muhammadiyah must involve stakeholders, specifically institute of higher education of Muhammadiyah (perguruan tinggi Muhammadiyah, PTM). PTM can become Muhammadiyah's schools as school of founding.

Keywords: *sinergi, education, Muhammadiyah*

Pendahuluan

Secara kuantitas jumlah pendidikan yang dimiliki Muhammadiyah sangat banyak. Karena itu tidak berlebihan jika ada orang yang mengatakan bahwa Muhammadiyah seharusnya turut bertanggung jawab pada nasib pendidikan nasional. Saat ranking pendidikan nasional tercecer di posisi bawah diantara negara-negara lain, kiprah Muhammadiyah juga dipertanyakan. Disamping persoalan mutu, pendidikan nasional juga dikritik karena belum mampu melahirkan individu yang berkarakter dan berintegritas. Yang ironis, justru terjadi banyak ketidakjujuran akademik (*academic dishonesty*) yang melibatkan unsur-unsur di sekolah saat ujian nasional (Unas). Kasus sontekan massal saat Unas terasa begitu sistemik dan massif.

Pemerintah secara tidak langsung sesungguhnya juga mengakui praktek ketidakjujuran saat Unas. Hal itu dapat dilihat dari paket soal yang diujikan. Misalnya dalam Unas 2013, paket soal yang diujikan mencapai 20 buah. Padahal dalam Unas 2012, paket soal yang diujikan hanya 5 buah. Pemerintah pun tetap menjadikan Unas sebagai salah satu alat menentukan kelulusan siswa. Padahal sejauh ini kebijakan Unas terus disorot karena dapat menimbulkan kecenderungan pemikiran yang mereduksi pendidikan hanya sekedar pabrik ijazah (*diploma*

mills), (Daniel Rosjid,2007). Apalagi sejak kisruh Unas 2013 yang membuat bangsa ini malu di mata dunia internasional. Dalam Kurikulum 2013, yang sering diplesetkan sebagai "Kurikulum Kapal Nuh", (Biyanto, Jawpos:2013). juga tampak jelas bahwa unas masih menjadi bagian dari mekanisme untuk menentukan kelulusan siswa.

Pertanyaannya, bukankah pendidikan seharusnya diorientasikan untuk menyiapkan individu yang memiliki *soft skill* memadai sehingga mampu menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan? Pertanyaan kritis bagi praktisi pendidikan di lingkungan persyarikatan adalah bagaimana Muhammadiyah menyikapi tantangan tersebut? Apa yang dapat dikontribusikan Muhammadiyah sehingga mampu mengangkat martabat pendidikan nasional di mata dunia? Seiring dengan persoalan ini, pendidikan Muhammadiyah harus mampu memberikan respon yang tepat. Dalam kaitan inilah Muhammadiyah perlu membangun sinergi dengan berbagai *stakeholder* untuk mewujudkan visi pendidikan agar terus dipercaya masyarakat dan mampu mencerahkan umat.

Landasan Amal Muhammadiyah

Tidak diragukan lagi, Muhammadiyah merupakan organisasi yang sangat menekankan integrasi iman dan amal. Hal itu setidaknya dapat diamati dari metode KH. Ahmad Dahlan (1868-1923), pendiri sekaligus ideolog Muhammadiyah, dalam mengajarkan ajaran Islam. Seorang murid dan sekaligus teman seperjuangan KH. Ahmad Dahlan (selanjutnya disebut Dahlan), KH. Hajid (1897-1977), menceritakan metode Dahlan dalam mempelajari al-Qur'an. Dikatakan Hajid, bahwa Dahlan kalau mempelajari al-Qur'an selalu menekankan prinsip *tartil* (membaca) dan *tadabbur* (memikirkan). Metode Dahlan dalam mempelajari al-Qur'an dilakukan dengan cara mengambil satu, dua, atau tiga ayat, lalu ditanyakan; (1) bagaimana artinya?, (2) bagaimana tafsir dan keterangannya?, (3) bagaimana maksudnya?, (4) apakah ini larangan dan apakah kamu sudah meninggalkannya?, dan (5) apakah ini perintah yang wajib dikerjakan dan sudahkah kita menjalankannya?, (Hajid, 2008: 65).

Metode penafsiran al-Qur'an model Dahlan tersebut telah mengundang decak kagum KH. Mas Mansur (1896-1946), tokoh Muhammadiyah yang bergelar Sapu Kawat Jawa Timur, (Syaifullah, 2005). Bermula dari kekaguman itulah maka pada 1915 dan 1916, Mas Mansur datang ke Jogjakarta untuk menemui Dahlan. Tampaknya Mas Mansur sangat terpicat dengan cara Dahlan menafsirkan al-Qur'an. Maka, secara khusus Mas Mansur pun berkeinginan untuk berdiskusi dengan Dahlan mengenai pokok-pokok ajaran Islam. Dalam kesempatan itulah Mas Mansur menyatakan bahwa saat menafsirkan al-Qur'an, Dahlan tampak sangat teliti, berhati-hati, mendalam kajiannya, dan selalu mencoba untuk mengontekstualisasikan dengan realitas kehidupan sosial, (Amir Hamzah, 1986:173-174)

Berkat bimbingan dan interaksi langsung dengan Dahlan itulah Mas Mansur menjadi tokoh hebat dalam sejarah pergerakan nasional. Ia termasuk empat tokoh pergerakan nasional yang saat itu sangat diperhitungkan. Empat tokoh pergerakan ini dikenal dengan "Empat Serangkai", yakni; Sukarno (1901-

1970), Mohammad Hatta (1902-1980), Ki Hajar Dewantara (1889-1959), dan Mas Mansur, (www.muhammadiyah.or.id). Saat kekejaman Jepang memuncak, Mas Mansur memutuskan kembali ke Surabaya. Posisi Mas Mansur dalam Empat Serangkai digantikan Ki Bagus Hadikusumo (1890-1954). Mas Mansur termasuk tokoh yang berjasa dalam pertempuran 10 November. Tanpa kenal lelah ia menyemangati pemuda-pemuda Surabaya melawan pasukan Belanda (NICA). Mas Mansur juga tercatat sebagai salah satu dari anggota Badan Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan RI (BPUPKI). Karir Mas Mansur di Muhammadiyah tergolong cemerlang. Mas Mansur pernah menjadi Ketua Pengurus Besar (PB) Muhammadiyah periode 1937-1943. Setelah terpilih menjadi ketua, Mas Mansur pindah ke Jogjakarta. Selama di Jogjakarta, Mas Mansur aktif juga sebagai guru di Madrasah Mu'allimin, (Yunan Yusuf, 2005:225).

Tokoh nasional asal Surabaya sekaligus pendiri perkumpulan Budi Utomo, Dokter Sutomo (1888-1938), juga dibuat takjub dengan cara Dahlan menerjemahkan ajaran Islam. Tatkala melihat realitas sosial umat yang terbelakang sehingga tidak sadar terhadap arti pentingnya kesehatan, Dahlan mengajarkan prinsip kedermawanan sosial (filantropi) melalui pembentukan Penolong Kesejahteraan Oemum (PKO). Melalui lembaga inilah amal usaha Muhammadiyah bidang kesehatan berkembang pesat. Dokter Sutomo pun terpesona dengan ajaran “kewelas-asihan” Muhammadiyah sebagaimana ditunjukkan Dahlan. Hal itu ditunjukkan Dokter Sutomo tatkala mewakili HB (*Hoofd Bestuur*) Muhammadiyah untuk meresmikan Poliklinik Muhammadiyah Surabaya (kini Rumah Sakit Muhammadiyah di Jalan KH. Man Mansur) pada 1924. Saat meresmikan poliklinik itulah Dokter Sutomo mengajak hadirin yang sebagian besar adalah nonik-nonik Belanda untuk menyumbang. Dengan tulus, hadirin memberikan sumbangan berupa perhiasan yang sedang dipakai. Bukan hanya bidang kesehatan, ajaran filantropi Dahlan juga tampak dalam pendirian panti jompo dan pengelolaan zakat secara modern (saat itu zakat masih dikelola kyai), (Munir Mulkhan, 2013:2) Itu semua menunjukkan keunikan Dahlan dalam mengamalkan ajaran Islam.

Kekaguman pada metode tafsir Dahlan juga dikemukakan Ahmad Syafii Maarif (lahir 1939), mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang akrab disapa Buya Syafii. Menurut Buya Syafii, metode tafsir tersebut menunjukkan bahwa Dahlan merupakan pribadi yang memiliki pengetahuan ganda; agama dan realitas sosial. Selanjutnya, Buya Syafii menanyakan mengapa metode penafsiran al-Qur'an yang kritis dan akurat tersebut belum membudaya di Muhammadiyah? Sangat disayangkan, metode yang sangat modern ini lebih banyak dipuji, tetapi tidak diikuti warga persyarikatan. (Syafii Maarif, 1986). Pernyataan Buya Syafii ini menegaskan betapa Dahlan telah berupaya menyandingkan ajaran al-Qur'an dengan realitas sosial umat. Maka, tidak mengherankan jika dikatakan bahwa secara keseluruhan pemikiran sosial keislaman Dahlan tampak sangat realistik dan pragmatis. Hingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Dahlan merupakan pembaru yang sangat menekankan amalan nyata dibanding sekedar berpikiran besar (*man of action*) (Yunan Yusuf,

2005:252). Pertanyaannya, apakah metode Dahlan dalam mengamalkan ajaran Islam telah menginspirasi keluarga besar Muhammadiyah?

Dampak dari pragmatisme ajaran Dahlan terasa sekali dalam keseluruhan sejarah dan perkembangan Muhammadiyah. Tampaknya inilah yang sekaligus menjadi pembeda Dahlan dengan pembaru lain di dunia Islam. Jika pembaru lain lebih banyak menaruh minat pada bidang pemikiran dan gerakan politik, Dahlan tampak sekali lebih menekankan aspek praksis ajaran dengan bidang perjuangan yang sangat luas. Dahlan juga menggunakan organisasi modern sebagai media perjuangan. Dengan menekankan pada wilayah praksis sosial berarti Dahlan telah mengajarkan agar warga Muhammadiyah melaksanakan prinsip *a faith in action*, atau dakwah *bi al-hal* (ajakan melalui tindakan konkrit), (Mitsuo Nakamura, 1976). Dalam kaitan ini berarti nilai-nilai bekerja keras, berdisiplin, tepat waktu, tolong-menolong, dan sedikit berbicara banyak bekerja, telah diteladankan *the founding fathers* Muhammadiyah dengan harapan agar diikuti oleh warga persyarikatan, (Achmad Jainuri, 2002)

Kecenderungan pragmatisme itu selanjutnya berimplikasi pada pembentukan beberapa amal usaha Muhammadiyah, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelayanan sosial. Khusus amal usaha bidang pendidikan, sejak Muhammadiyah didirikan hingga kini, tetap menjadi “ikon” persyarikatan. Amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan pun terus berkembang pesat, baik secara kuantitas maupun kualitas. Faktanya, hingga kini Muhammadiyah mengelola lebih dari 10.000 lembaga pendidikan mulai tingkat dasar dan menengah hingga perguruan tinggi. Itu belum termasuk PAUD dan TK Aisyiyah, (Yunan Yusuf, 2005:256). Hanya saja, fakta menunjukkan bahwa secara kualitas pendidikan Muhammadiyah masih sangat beragam. Terkadang dijumpai ada lembaga pendidikan di daerah tertentu berkembang sangat maju, sementara di tempat lain belum menunjukkan kiprah yang menggembirakan.

Konteks Pendidikan Era Global

Sistem pendidikan nasional juga belum menunjukkan prestasi yang menggembirakan di level internasional. Data *Education for All (EFA) Global Monitoring Report 2011* yang dikeluarkan Unesco pada 1 Maret 2011 telah menunjukkan indeks pembangunan pendidikan Indonesia berada pada urutan 69 dari 127 negara yang disurvei. Posisi Indonesia hanya lebih baik dari Filipina, Kamboja, dan Laos. Indonesia masih kalah dari Singapura, Malaysia, dan Brunei. Sistem pendidikan yang dianggap terbaik di Asia ditempati Jepang. Sementara negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia adalah Finlandia.¹

Hasil survei *Programme for International Student Assessment (PISA)* pada 2012 juga mengonfirmasi rendahnya posisi pendidikan nasional. PISA menguji kemampuan siswa di tiga bidang yaitu matematika, membaca, dan sains. Survei PISA diikuti lebih dari 510.000 siswa usia 15 tahun di 65 negara. Hasilnya, di

¹Anonim, “Pendidikan & Kebudayaan,” *Kompas* (3 Maret 2011), 12. Ada empat indikator yang dijadikan dasar dalam menentukan kriteria sistem pendidikan, meliputi; angka partisipasi pendidikan dasar, angka melek huruf pada anak usia 15 tahun ke atas, angka partisipasi menurut kesetaraan jender, dan angka bertahan siswa hingga kelas V sekolah dasar.

bidang matematika, Indonesia menduduki peringkat ke-64 atau hanya lebih tinggi satu tingkat dari Peru. Di bidang membaca, Indonesia berada di peringkat ke-60 atau setingkat di bawah Malaysia. Sedangkan untuk bidang sains, Indonesia berada di urutan ke-64. (www.statcan.gc.ca) Hasil survei tersebut semakin menegaskan posisi daya saing pendidikan nasional di level dunia.

Pendidikan di era kini, sering juga dikatakan era global, dihadapkan pada beberapa tantangan. Menurut Zamroni, dampak globalisasi terhadap pendidikan setidaknya tampak pada tiga kecenderungan (Mifedwil Jandra, 2005:143-146). *Pertama*, munculnya kecenderungan komersialisasi dan komoditisasi atas pendidikan. Pemerintah yang semestinya mengambil peran besar dalam kesuksesan pendidikan ternyata banyak digantikan perannya oleh masyarakat. Akibatnya, pendidikan layaknya sebagai proses ekonomi dan diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Maka, ibarat pasar bebas setiap lembaga pendidikan berlomba-lomba melakukan promosi untuk merekrut konsumen. Bahkan dalam rekrutmen konsumen ini, tidak jarang lembaga pendidikan melakukan manipulasi data untuk mengelabui masyarakat. Contoh kecenderungan komersialisasi pendidikan dapat dilihat melalui cara mengemasnya sehingga laku di pasar (*marketable*). Karenanya tidak mengherankan jika kini bermunculan layanan fasilitas kelas eksekutif (kuliah Sabtu-Minggu), program kelas jauh, dan paket-paket pendidikan terstandar dan serba instan lainnya.

Dampak *kedua*, globalisasi melahirkan spirit internasionalisasi di lembaga pendidikan. Itu berarti pendidikan pun perlu distandarisasi guna meningkatkan daya saing global. Kebijakan pemerintah sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), menunjukkan keinginan meningkatkan daya saing pendidikan nasional di mata dunia. Dengan label RSBI, siswa dijanjikan memperoleh pelayanan akademik dan non-akademik berkelas dunia. Konsekwensinya, siswa yang belajar di sekolah berlabel RSBI harus berkemampuan akademik lebih dan mengeluarkan biaya super mahal, meski sesungguhnya terasa sangat sulit membedakan sekolah RSBI dan reguler, (Biyanto, 2013) Di samping RSBI, juga ada mekanisme *International Organization for Standardization* (ISO) sebagai standar untuk menentukan sistem manajemen mutu yang dikeluarkan lembaga-lembaga internasional. Pertanyaannya, sudahkah sekolah Muhammadiyah bersertifikat ISO memberikan layanan terbaik layaknya pendidikan berkelas dunia?

Dampak *ketiga*, munculnya kondisi di mana kemampuan bangsa untuk hidup dalam era global tidak lagi ditentukan oleh modal yang berupa fisik berupa kekayaan alam atau mesin industri. Untuk mencapai kesejahteraan pada era global ini dibutuhkan modal maya (*virtual capital*), meliputi; penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (*intellectual capital*), jaringan kerjasama yang didasarkan pada kepercayaan (*social capital*), dan watak atau moral yang dimiliki bangsa (*moral capital*). Tiga modal berharga ini sangat penting dimiliki suatu bangsa agar dapat menentukan posisinya dalam persaingan di era global. Itulah sebabnya mengapa negara-negara maju tidak selalu mengandalkan kekayaan alam. Bagi mereka yang penting adalah membangun sumber daya manusia (SDM) sehingga berdaya saing global.

Jepang merupakan contoh negara maju yang sangat mengandalkan modal SDM. Jepang bisa jadi miskin dari segi sumber daya alam. Tetapi jangan ditanya ikhtiar pemerintah Jepang dalam membangun SDM. Hasilnya, Jepang semakin mengokohkan diri sebagai negara maju dengan sistem pendidikan yang hebat. Ingatlah kisah inspiratif yang menunjukkan perhatian pemerintah Jepang terhadap pendidikan. Dikisahkan, beberapa saat setelah bom atom dijatuhkan di Jepang, pertanyaan pertama yang diajukan Kaisar Jepang adalah "Berapa guru yang masih hidup?" (Anies Baswedan, 2013). Kisah ini beredar luas di masyarakat. Bisa jadi cerita itu mitos, namun narasi itu jelas memiliki konteks yang valid. Pemimpin "Negeri Sakura" itu memikirkan pendidikan sebagai persoalan yang amat mendasar untuk bangkit, menang, dan kuat. Kaisar menyadari betul bahwa bukan kekayaan alam yang akan membuat Jepang menjadi kuat. Jepang menjadi negara kuat dan diperhitungkan dunia dikarenakan kualitas sumber daya manusianya yang andal.

Di samping mempertimbangkan tantangan era global, pendidikan Muhammadiyah juga dihadapkan pada problem riil berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang terkadang tidak berempati pada sekolah swasta. Kebijakan pengalokasian dana bantuan yang jauh dari rasa keadilan, sertifikasi, *inpassing* guru non-PNS, pendidikan gratis, pembukaan sekolah baru, dan penerimaan siswa baru yang melampaui daya tampung sekolah negeri, tampak sekali telah menimbulkan dampak yang kurang menggembirakan bagi sekolah Muhammadiyah. Untuk sekolah berkategori unggul (*excellent school*) barangkali tidak ada masalah karena jelas memiliki daya tahan kuat. Tetapi untuk sekolah Muhammadiyah berkategori kecil pasti akan merasakan dampak dari kebijakan tersebut. Akibatnya, beberapa sekolah Muhammadiyah kelas menengah ke bawah berubah status menjadi "darurat" sehingga harus diselamatkan.

Mewujudkan Visi Muhammadiyah

Secara normatif dapat dikatakan bahwa visi pendidikan Muhammadiyah harus diarahkan untuk mencapai maksud dan tujuan persyarikatan. Dalam Anggaran Dasar dikatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam dakwah amar makruf nahi munkar dan tajdid yang bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah. Adapun maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, (AD Muhammadiyah Pasal 4 ayat 1 dan pasal 6). Sebenarnya bukan hanya amal usaha bidang pendidikan yang harus berorientasi untuk mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah. Tetapi seluruh amal usaha, termasuk bidang kesehatan, ekonomi, dan layanan sosial lainnya. Dengan kata lain, seluruh amal usaha Muhammadiyah harus dijadikan sebagai media dakwah persyarikatan. Ini penting ditekankan karena realitas menunjukkan bahwa amal usaha yang banyak seringkali belum diikuti dengan peningkatan jumlah warga Muhammadiyah.

Untuk mewujudkan visi pendidikan sehingga dapat dijadikan sarana mencapai tujuan Muhammadiyah dan dakwah persyarikatan maka perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut;

Pertama, pendidikan Muhammadiyah harus dijadikan media untuk mengajarkan faham Islam yang berkemajuan. Pandangan mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berkemajuan sudah muncul sejak awal. Idiom “kemajuan”, “memajukan”, “maju”, dan “berkemajuan” telah diperkenalkan oleh pendiri dan ideolog Muhammadiyah. Pernyataan berbunyi; “Memajoekan hal Igama kepada anggauta-anggaoutanja” muncul pertama kali tahun 1912. Dalam edisi awal *Suwaru Muhammadiyah* yang di tulis dalam bahasa Jawa diungkapkan; “Karena menurut tuntunan agama kita Islam, serta sesuai dengan kemauan zaman · kemajuan”. (www.muhammadiyah.or.id). Dalam Mukhtar Muhammadiyah ke-37 tahun 1968, di Jogjakarta, dikatakan bahwa karakter masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, salah satu cirinya adalah masyarakat yang maju dan dinamis, serta dapat menjadi contoh.

Karakter Islam yang berkemajuan ini dipertegas dalam “Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua” pada Mukhtar Muhammadiyah ke-46 tahun 2010, di Jogjakarta, yang menyatakan; “Islam berkemajuan menyemaikan benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran dan keutamaan hidup secara dinamis bagi seluruh umat manusia, Islam yang menjunjung tinggi kemuliaan manusia baik laki-laki maupun perempuan tanpa diskriminasi. Islam yang menggelorakan misi anti perang, antiterorisme, antikekerasan, antipenindasan, antiketerbelakangan dan anti terhadap segala bentuk pengrusakan di atas muka bumi seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kejahatan kemanusiaan, eksploitasi alam, serta berbagai kemungkaran yang menghancurkan kehidupan. Islam yang secara positif melahirkan keutamaan yang memayungi kemajemukan suku, bangsa, ras, golongan dan kebudayaan umat manusia di muka bumi”.

Faham Islam menurut Muhammadiyah terangkum dalam spirit kembali pada al-Qur’an dan Sunnah (*al-ruju’ ila al-Qur’an wa al-Sunnah*). Tentu tidak hanya berhenti di sini, perlu dipikirkan juga bagaimana cara kita kembali pada al-Qur’an dan Sunnah (*kayfa narja’ ila al-Qur’an wa al-Sunnah*). Pertanyaan ini jelas berkaitan dengan problem epistemologi dan metodologi. Pada konteks inilah perlu dijelaskan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan yang bersifat non-mazhab. Dikatakan oleh Mas Mansur, bahwa Islam menurut Muhammadiyah tidak pernah terikat paham atau mazhab tertentu. Mas Mansur juga menyatakan bahwa paham agama itu sejatinya bukan agama. Dalam *Langkah Kedua* dari 12 Langkah Muhammadiyah, Mas Mansur menyatakan bahwa paham agama itu harus diperluas. Yang tidak boleh diperluas adalah agama karena merupakan wahyu Allah dan sudah sempurna, (Amir Hamzah, 1968:172-177). Ini jelas peringatan bagi kita dan menjadi tugas lembaga pendidikan untuk memberikan pencerahan pada umat. Para pendidik Muhammadiyah dituntut untuk mengajarkan dan memperluas ajaran agama sehingga Islam bersifat kompatibel dengan segala waktu dan tempat (*shalihun li kulli zaman wa makan*).

Kedua, pendidikan Muhammadiyah harus mencerahkan sehingga mampu menghasilkan individu yang berkarakter dan berintegritas. Wacana pendidikan karakter ini kini digalakkan seiring dengan problem demoralisasi yang dihadapi bangsa. Bukan hanya di bidang pendidikan, persoalan demoralisasi juga dijumpai di lembaga-lembaga publik seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurut

Din Syamsuddin, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kondisi bangsa saat ini sedang dihindangi penyakit *moral illiteracy* (buta aksara moral). Indikatornya, banyak orang tidak lagi mampu membedakan perilaku yang baik dan yang buruk. Pejabat publik secara berjamaah melakukan tindak pidana korupsi tanpa perasaan malu sedikit pun.

Bahkan lebih ekstrim, Taufiq Abdullah menyatakan bahwa saat ini telah terjadi gejala *spiral stupidity* (lingkaran kebodohan), (Dien Syamsudin, 2011). Kasus suap-menyuap dan korupsi yang terus meningkat mulai dari rakyat kebanyakan hingga tingkat elit menunjukkan kebenaran potret yang disinyalir Din Syamsuddin dan Taufiq Abdullah. Dalam konteks inilah pendidikan Muhammadiyah harus berorientasi untuk mencerahkan umat. Ini penting agar lembaga pendidikan tidak dipandang sebagai lembaga yang turut memroduk koruptor. Bukankah kasus korupsi yang kini menjadi perhatian publik banyak melibatkan figur dengan latar belakang pendidikan tinggi bergelar sarjana (S-1), master (S-2), dan doktor (S-3)? Bahkan ada juga gurubesar dengan rekam jejak hebat saat di kampus kemudian terlibat dalam kasus korupsi karena bersinggungan dengan kepentingan politik dan kekuasaan.

Ketiga, pendidikan Muhammadiyah harus mendorong terwujudnya nilai-nilai tolong-menolong (*al-ta'awun*). Perbincangan mengenai *al-ta'awun* atau *al-Ma'unisme* (sering dielaborasi Din Syamsuddin sebagai *the theology of al-Ma'unism*) begitu menonjol di kalangan warga Muhammadiyah. Hingga dapat dikatakan bahwa selain ayat 104 surat *Ali 'Imran* (QS. 3) yang telah menginspirasi pendirian Muhammadiyah, keluarga besar persyarikatan juga mengenal dengan baik kajian tafsir Dahlan terhadap surat *al-Ma'un* (QS. 107). Surat *al-Ma'un* inilah yang dijadikan dasar bagi Dahlan untuk menggali sumber dana masyarakat guna membangun basis teologi pengembangan amal sosial Muhammadiyah, (Suara Muhammadiyah, 2005). Berdirinya sekolah, poliklinik, panti asuhan, dan amal zakat, oleh pendiri sekaligus ideolog Muhammadiyah di masa awal merupakan terjemahan dari ajaran *al-Ma'unisme* tersebut.

Kisah inspiratif pembelajaran Dahlan terhadap murid-muridnya mengenai surat *al-Ma'un* dicerita dengan baik oleh Muhammad Sujak (1885-1962). Santri Dahlan ini suatu saat memberanikan diri untuk bertanya pada gurunya; "Kyai, mengapa surat *al-Ma'un* dan pelajaran tafsirnya diulang-ulang?" Dahlan pun menjawab; "Apakah kalian sudah mengerti betul?" Sujak menjawab bahwa ia dan teman-temannya sudah hafal dan mengerti. Namun Dahlan kembali bertanya; "Apakah sudah diamalkan?" Sujak pun menjawab bahwa ia dan teman-temannya sudah mengamalkan dengan membaca surat *al-Ma'un* berulang-ulang saat shalat. Mendengar jawaban ini Dahlan menyatakan bahwa maksud mengamalkan adalah mempraktekkan kandungan surat *al-Ma'un*. Untuk menunjukkan pengertian ini Dahlan pun memerintahkan agar para santrinya mencari anak yatim dan fakir miskin kemudian memberi mereka sabun, pakaian, makanan, dan minuman. Pemahaman inilah yang kemudian melahirkan teologi amal shalih yang populer disebut *al-Ma'unisme*, (Bahrus Surur: 2005).

Dalam dunia pendidikan, nilai-nilai *al-Ma'unisme* ini perlu digalakkan sehingga sekolah Muhammadiyah yang besar dapat membantu sekolah yang kecil. Praktik subsidi silang yang dilakukan sekolah yang kaya terhadap sekolah yang

miskin merupakan cerminan dari ajaran *al-Ma'unisme*. Jika jiwa *al-Ma'unisme* dipraktekkan maka tidak akan terjadi penutupan sekolah Muhammadiyah. Seperti penutupan SMA Muhammadiyah 6 (Dupak, Bubutan, Surabaya) dan SMA Muhammadiyah 8 (Balongsari, Tandes, Surabaya), (*Jawa Pos* , 2011/26-27 Juli). Fakta ini seharusnya menjadi koreksi bagi Muhammadiyah terhadap pelaksanaan ajaran *al-Ma'unisme*. Selama ini kita selalu menjadikan pendidikan sebagai "ikon" Muhammadiyah, ternyata harus melihat kenyataan bahwa ada sekolah kita yang harus diselamatkan karena ditutup oleh pemerintah.

Salah satu alasan pemerintah untuk menutup sekolah adalah karena tidak mampu mendapatkan jumlah minimal siswa baru sebagaimana yang dipersyaratkan. Coba bandingkan dengan sekolah Muhammadiyah lain yang berjubel peminat sehingga harus membuang begitu banyak pendaftar. Menghadapi situasi ini, tidak ada jalan lain yang harus dilakukan kecuali menghidupkan kembali nilai-nilai *al-Ma'unisme*, termasuk dalam penerimaan siswa baru. Harus ada kebijakan, tentu melalui persyarikatan, yang memungkinkan sekolah berkategori besar dan mapan untuk mengambil alih (*take over*) manajemen sekolah kecil. Termasuk dalam hal ini adalah subsidi sumber daya dan keuangannya. Sinergi antar sekolah besar dan kecil mutlak diperlukan agar pendidikan Muhammadiyah *survival* di tengah persaingan pendidikan yang begitu ketat. Bahkan bukan hanya melibatkan sekolah yang mapan, sinergi juga bisa dilakukan dengan perguruan tinggi Muhammadiyah (PTM). Dalam hal ini PTM dapat memilih sekolah Muhammadiyah tertentu untuk dijadikan laboratorium. Sinergi sekolah Muhammadiyah dan PTM harus digelorakan untuk mempercepat perkembangan pendidikan di lingkungan persyarikatan.

Keempat, pendidikan Muhammadiyah harus mampu menjadi pelopor pendidikan multikulturalisme sejalan dengan pluralitas masyarakat. Pendidikan Muhammadiyah harus disadari sebagai bagian dari ruang publik (*public sphere*). Siapa pun dapat bergabung dengan sekolah Muhammadiyah guna menunaikan tugas suci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Karya Abd Mu'thi dan Fajar Riza Ul Haq membuka mata kita betapa pendidikan berbasis multikulturalisme mutlak diperlukan di sekolah Muhammadiyah, (Abdul Mu'thi:2009). Urgensi pendidikan multikulturalisme lebih mendesak terutama di daerah-daerah minoritas muslim. Apalagi realitas menunjukkan bahwa tidak semua siswa atau guru di sekolah Muhammadiyah berlatar sosial warga persyarikatan.

Pengalaman di daerah minoritas Muslim bahkan menunjukkan banyak sekolah Muhammadiyah yang dijadikan tempat belajar keluarga non-Muslim. Salah satu contoh adalah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Di NTT misalnya ada Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK). Yang menarik, ternyata mayoritas mahasiswa UMK adalah pemeluk Kristen. Maka, tidak mengherankan jika banyak alumni UMK yang berkiprah sebagai pendeta, pastur, romo, biarawati, dan fungsional gereja lainnya. Realitas ini menyebabkan UMK seringkali diplesetkan menjadi "Universitas Muhammadiyah Kristen". Karena itulah penting disimak pesan Malik Fajar (lahir 1939) yang meminta agar warga Muhammadiyah membiasakan diri untuk hidup dalam suasana lingkungan dan budaya yang pluralistik, (Abdul Malik Fajar, 2007)

Kelima, pendidikan Muhammadiyah harus mampu memadukan nilai-nilai keikhlasan dan profesionalitas. Orang seringkali mempertentangkan prinsip bekerja secara profesional di Muhammadiyah dengan nilai-nilai keikhlasan. Akibatnya muncul pemahaman yang salah terhadap dua konsep penting ini. Bekerja dengan ikhlas dianggap "serba gratisan" dan "tidak profesional". Sebaliknya, bekerja profesional dimaknai kurang ikhlas karena menuntut gaji besar. Agar dua sifat ini tidak dipertentangkan maka perlu dijelaskan secara utuh. Menurut Watik Pratiknya (lahir 1948), keikhlasan itu sesungguhnya berada dalam kawasan niat (*state of mind*). Sedangkan profesionalitas itu berada dalam manajemen perjuangan (*state of action*). Dengan demikian prinsip keikhlasan dan profesionalitas merupakan persyaratan yang saling melengkapi untuk suksesnya suatu perjuangan, (Ahmad Watik Pratiknya, 1990: 141-144).

Selanjutnya, Watik Pratiknya menyebut empat ciri bekerja profesional meliputi; (1) memanfaatkan ilmu dan teknologi, (2) dilakukan oleh orang yang ahli di bidangnya, (3) memperhatikan dan mengupayakan optimalisasi hasil kerja, (4) pertimbangan rasionalitas tinggi dengan memanfaatkan manajemen. Ciri pertama berkaitan dengan pemanfaatan iptek untuk memperlancar tugas dan melaksanakan program. Misalnya, pemanfaatan layanan informasi dan teknologi (IT) untuk tugas-tugas administrasi, metode hisab dalam penentuan awal dan akhir Ramadan, pemanfaatan pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam berdakwah, serta penggunaan psikotest untuk mengenali gejala kejiwaan calon pimpinan dan karyawan amal usaha Muhammadiyah. Termasuk tes psikologi untuk calon kepala, wakil kepala, guru, dan karyawan di sekolah Muhammadiyah.

Ciri kedua berkaitan dengan pertimbangan penempatan atau rekrutmen pimpinan dan karyawan amal usaha berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Karena itu, ungkapan *the right man on the right place*, terasa sangat relevan. Yang tidak boleh dilakukan adalah prinsip *man with the wrong place* atau *man with the many places*. Ini berarti harus diupayakan agar fungsionaris organisasi dan pimpinan amal usaha benar-benar bertugas sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Penempatan orang per orang di lembaga pendidikan pasti membutuhkan pertimbangan kompetensi. Karena itu kehati-hatian saat melakukan rekrutmen tenaga di amal usaha Muhammadiyah penting dilakukan. Meski harus diakui, terkadang ada kesulitan dalam menentukan pilihan antara kader atau profesionalitas.

Adapun ciri ketiga berkenaan dengan pentingnya perencanaan yang mapan agar setiap program dapat menghasilkan kerja yang optimal. Dalam kaitan inilah pola pikir *need for achievement* (dikenal dengan rumus; $N+Ach$) perlu dibudayakan pimpinan amal usaha, termasuk yang bekerja di lembaga pendidikan. Dengan program yang terencana dan terukur diharapkan akan diperoleh hasil yang maksimal. Ciri ketiga ini berkaitan erat dengan ciri terakhir karena menekankan perlunya penggunaan manajemen dalam mengelola sumber daya. Watik Pratiknya mengingatkan agar dalam melaksanakan program kita tidak bersemboyan "sebisanya" atau "asal jadi" dikarenakan ini mengindikasikan belum profesional. Kita harus menyatukan niat dan ikhtiar sehingga tidak boleh menyatakan; "Yang penting kan niatnya, bagaimana hasilnya terserah Tuhan." Islam mengajarkan bahwa harus ada kesinambungan antara niat dan ikhtiar. Nabi memang

mengatakan; *Innama al-a'mal bi al-niyyati*, tetapi bukanlah al-Qur'an juga menyerukan; *innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim*. Itu berarti keselarasan niat dan ikhtiar merupakan indikasi profesionalitas.

Profesionalisme pengelolaan pendidikan juga dapat dicirikan dalam rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah. Profesionalitas selalu menekankan pada *achievement* (prestasi) dan bukan *ascription* (berdasarkan status). Dengan kata lain, sistem penghargaan tidak lagi didasarkan pada "prestise" tetapi lebih pada "prestasi" seseorang. Contoh umum sistem penghargaan berdasarkan prestise yang bersifat *ascription* adalah nepotisme, yaitu rekrutmen tenaga kerja berdasarkan hubungan kekeluargaan atau darah, (Guy Woche, 1975: 38-39). Dalam hal ini nepotisme jelas tidak sejalan dengan sikap hidup masyarakat era modern yang menuntut agar penghargaan didasarkan pada prestasi.

Dalam sosiologi selalu ditekankan nilai-nilai *achievement orientation* (hidup berorientasi prestasi). Filsuf Barat bernama Rene Descartes (1596-1650) pernah mengajarkan prinsip *cogito ergo sum* (aku berpikir maka aku ada), (Anthony Flew, 1984:90). Pernyataan itu pun kemudian menjadi basis filsafat eksistensialisme. Jika ajaran ini digunakan sebagai inspirasi, maka prinsip Descartes dapat diubah menjadi *labora ergo sum* (aku beramal maka aku ada). Dengan demikian eksistensi seseorang itu sangat bergantung pada kualitas amalnya. Pola pikir inilah yang harus dikembangkan pimpinan sekolah. Keberadaan dan kemanfaatan pimpinan sekolah akan dirasakan jika ia telah berbuat yang terbaik bagi sekolahnya.

Keenam, pendidikan Muhammadiyah harus dijadikan sarana untuk melakukan dakwah dan kaderisasi. Dalam "Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah" dikatakan bahwa karyawan amal usaha Muhammadiyah adalah warga (anggota) Muhammadiyah yang dipekerjakan sesuai dengan keahlian dan kemampuannya, (PWM Jatim, 2001: 108-109). Karena itu harus dipastikan bahwa seluruh tenaga pendidik dan kependidikan telah berstatus anggota dan aktivis Muhammadiyah. Ini penting agar tidak muncul opini bahwa karyawan amal usaha Muhammadiyah sekedar bekerja, mencari nafkah, dan numpang lewat. Sementara mereka tidak mau peduli dengan kegiatan persyarikatan di cabang dan ranting di mana ia bertempat tinggal.

Berkaitan dengan itulah, tugas pimpinan sekolah bersama persyarikatan adalah melakukan pembinaan agar warga sekolah memahami dan terlibat aktif dalam kegiatan Muhammadiyah. Dengan cara ini berarti amal usaha pendidikan akan mampu menjadi media dakwah dan kaderisasi persyarikatan. Berkaitan dengan fungsi kaderisasi, pimpinan lembaga pendidikan Muhammadiyah harus memaksimalkan kinerja organisasi otonom (Ortom), seperti Hizbul Wathan, Tapak Suci Putera Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Pelajar Muhammadiyah harus didorong untuk beraktivitas di Ortom tersebut. Pimpinan sekolah juga harus mengajak perguruan tinggi Muhammadiyah (PTM) untuk bekerjasama. Dalam hal ini PTM dapat berperan untuk menjadikan sekolah Muhammadiyah sebagai

sekolah laboratorium. Sinergi sekolah dan kampus ini mutlak dilakukan untuk mempercepat kemajuan pendidikan Muhammadiyah di masa mendatang.

Penutup

Posisi Muhammadiyah untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional dan indeks pembangunan manusia jelas sangat besar. Itu karena amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan mulai pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, pesantren, hingga pendidikan tinggi tersebar di seluruh penjuru negeri. Semua sumber daya Muhammadiyah harus bersinergi untuk mewujudkan visi pendidikan yang bermutu. Yang harus disadari, pendidikan merupakan investasi jangka panjang sehingga hasilnya seringkali tidak dapat dilihat dalam waktu yang singkat. Karena itulah mantan senator dan penggagas yayasan beasiswa Fulbright untuk program pertukaran mahasiswa Amerika Serikat dengan negara-negara berkembang, William Fulbright, pernah menyatakan; *the education is a slow movement, but powerful force*. Pernyataan ini menunjukkan, bahwa meski investasi pendidikan itu bergerak lambat namun memiliki kekuatan yang luar biasa di masa mendatang. Berkaitan dengan itu maka Muhammadiyah harus terus berkiprah guna menjadikan pendidikan sebagai media untuk menyiapkan generasi masa depan bangsa yang berintegritas, berakarakter, dan berdaya saing. Semoga di masa mendatang terjadi sinergi dalam menyelenggarakan pendidikan Muhammadiyah sehingga berdaya saing di level nasional dan internasional.